

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PADA DESA BATUMA'ONRO KECAMATAN BIRINGBULU DI KABUPATEN GOWA

Muhammad Basir¹, Abdul Mahsyar², Anwar Parawangi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: mbasri@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the policy evaluation of the National Program for Empowerment of Rural Independent Communities (PNPM-MD) in Batuma'onro Village, Biringbulu District, Gowa Regency and analyze the factors that influence it, using descriptive qualitative research type. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the PNPM-MD policy was quite effective in providing solutions to the problem of poverty, especially attention to the development of village infrastructure, but for venture capital assistance, workshop, and youth assistance, it was considered that it still needed to be improved and considered inefficient because funding was relatively small. Internal factors that influence PNPM-MD policies are the commitment of the sub-district government, village government, PJOK, sub-district facilitators, KPMD, as well as the TPK and UPK. Whereas the external factor is the existence of community participation, a supervisory team from the community, and community leaders.

Keywords: Policy Evaluation, Community Empowerment, Rural

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Batuma'onro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNPM-MD cukup efektif dalam memberikan solusi masalah kemiskinan terutama perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, namun untuk bantuan modal usaha, perbengkelan, dan bantuan karang taruna dinilai masih perlu ditingkatkan dan dinilai tidak efisien karena pendanaannya relatif kecil. Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan PNPM-MD adalah adanya komitmen dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PJOK, fasilitator kecamatan, KPMD, serta TPK dan UPK. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya partisipasi masyarakat, tim pengawas dari masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Pedesaan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan selalu dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah pencapaian pertumbuhan masyarakat yang lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri, dan ini tidak terlepas dari dukungan stabilitas dan keamanan yang tinggi pula demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional sangat ditentukan oleh adanya pengertian, kesadaran, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan. Sukses tidaknya pembangunan yang dilaksanakan sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang didukung oleh masyarakat. Pembangunan nasional diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, daerah, sampai pada tingkat pusat, secara terintegrasi dan terpadu dengan perencanaan dan pelaksanaan, sehingga optimalisasi pembangunan tersebut dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam 3 (tiga) arah kebijakan yang saling mendukung. *Pertama*, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. *Kedua*, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. *Ketiga*, kebijakan khusus yang mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin.

Paradigma pembangunan telah mengalami perubahan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara, menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat (*community development*). Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam bidang pembangunan tersebut, yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat, diantaranya dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD), yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Antar daerah. Dimana, program ini di titikberatkan pada penguatan ekonomi produktif lokal yang diharapkan benar-benar memberikan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal.

Mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan PNPM-MD bukanlah kegiatan satu kali. Evaluasi kinerja adalah proses yang mencakup perencanaan sejak awal dan memeliharanya secara teratur. Perencanaan kinerja membutuhkan waktu dan dituntut pula satu pemikiran. Untuk melakukan evaluasi proses pelaksanaan PNPM-MD dilakukan kajian tentang program itu sendiri, identifikasi pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan, kajian tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam PNPM-MD, pemberdayaan masyarakat dalam PNPM-MD, dan analisis kesesuaian konsep dan pelaksanaannya.

Evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan

penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Nawawi, 2009).

Proses evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, oleh karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya, yaitu: (1) Fokus nilai, evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial; (2) Interdependensi fakta-nilai, pemantauan (menghasilkan fakta) merupakan prasyarat bagi evaluasi (menghasilkan nilai); (3) Orientasi masa kini dan masa lampau, evaluasi bersifat retrospektif dan prospektif; dan (4) Dualitas nilai, nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda (intrinsik dan ekstrinsik).

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu evaluasi kebijakan juga dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.

PNPM-MD juga sudah terlaksana di Desa Batuma'lonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, dan terlihat bahwa masyarakat sangat mendukung kegiatan PNPM-MD yang dilaksanakan di desa mereka. Kegiatan ini dianggap dapat menyatu dengan masyarakat, masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang melaksanakan, dan masyarakat yang menikmatinya, misalnya jalan-jalan tani yang telah dibangun dapat digunakan masyarakat sesuai dengan keperluannya.

Kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan yang berbasis masyarakat, dipandang sebagai salah satu solusi yang dianggap efektif dalam mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan program-program pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak sedikit proyek pembangunan yang dihasilkan selama ini terkesan mubatsir atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena persoalan tidak terlibatnya masyarakat dalam kegiatan tersebut mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya, termasuk dalam hal ini

adalah pemeliharaan hasil pembangunan yang ada.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan PNPM-MD di Desa Batuma'lonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan bukan hanya tentang perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang tengah diimplementasikan. Namun, juga membahas persoalan perencanaan, isi implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh kebijakan itu sendiri.

Evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tujuannya dengan kebijakan itu sendiri, para analisis dan perumus kebijakan selalu membuat penilaian melalui pendapat mereka mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program, dan proyek yang tengah dan atau telah dilaksanakan banyak pendapat mengenai evaluasi kebijakan dinyatakan dalam variasi yang mengesankan, baik yang bersifat anekdot dan sepotong-sepotong, dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan partisan, ataupun kriteria penilaian yang lainnya.

Dalam evaluasi kebijakan akan terlihat apakah kebijakan publik ada hasilnya dan dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Selanjutnya dapat dijadikan dasar apakah suatu kebijakan layak diteruskan, direvisi atau dihentikan sama sekali (Subarsono, 2008).

Selanjutnya menurut Dunn (Agustino, 2006: 187-189), fungsi evaluasi kebijakan publik ada 3 (tiga): *Pertama*, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan, meliputi: (1) Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/ program. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai; (2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan; dan (3) Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik sehingga untuk memberikan informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan bagi warga masyarakat.

Kedua, evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok, golongan, partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai. Nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan oleh para *decision maker* perlu dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah-masalah yang hendak dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis kebijakan dapat menguji alternatif nilai yang pernah diperhitungkan maupun landasan-landasan para *decision-maker* dalam berbagai bentuk rasionalitas.

Ketiga, Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan yang

dihasilkan dari proses evaluasi kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak Anderson (1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional karena evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut Stewart (Agustino (2006: 185), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) tugas yang berbeda, yaitu: (1) Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atautidak tidak. Bila tidak, faktor apa yang menyebabkannya; dan (2) Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penilaian apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi (Jones, 1984). Spesifikasi meliputi identifikasi tujuan atau kriteria di mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran atau kriteria ini yang akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Rekomendasi yakni penentuan tentang apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang.

Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD)

Melalui proses pembangunan partisipatif, masyarakat diharapkan mampu ditumbuhkembangkan sehingga bukan sebagai objek, melainkan subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena perencanaan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas sehingga kebutuhan masyarakat bisa terjawab.

PNPM-MD sebagai sebuah program yang bertujuan untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, menjadi penting sebagai sebuah kebijakan negara. Program ini diharapkan mampu memberikan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan. PNPM-MD mencakup aspek kegiatan ekonomi, kegiatan fisik, penguatan kelembagaan dan aspek pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah program.

Beberapa peraturan yang menjadi payung hukum utama untuk Penyediaan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) oleh Kota/Kabupaten yang diperlukan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.

PNPM-MD memberikan bantuan hibah berupa pembangunan sarana dan prasarana, bantuan dana bergulir untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

PNPM-MD menekankan pelaksanaan penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang partisipatif. Bantuan PPK mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal khususnya wilayah kecamatan dalam wadah yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal di tingkat

wilayah kecamatan dalam wadah musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan.

Melalui PNPM-MD, bantuan langsung berupa hibah bergulir diberikan melalui kepala desa dikoordinasi oleh camat dengan peruntukan bagi investasi sosial, investasi ekonomi yang menghasilkan dana bergulir dan kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal (*capacity building and institution building*).

PNPM-MD sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai (*open menu*), terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Lingkup kegiatan PNPM-MD pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi, serta melibatkan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan usulan apapun yang sesuai kebutuhannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batuma'lonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa sebagai daerah yang melaksanakan program PNPM-MD. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, agar dapat mengungkap dan memahami tentang evaluasi kebijakan PNPM-MD di Desa Batuma'lonro secara mendalam. Adapun tipe penelitian ini bersifat deskriptif, dengan mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi terkait evaluasi kebijakan PNPM-MD di Desa Batuma'lonro.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dengan melakukan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Batuma'lonro.

a. Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara ditekankan bahwa terdapat sejumlah hal yang dilakukan pada orientasi dan pengamatan lapang PNPM-MD di Desa Batuma'lonro, yaitu mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program, kemudian pelibatan *stakeholder* dalam PNPM-MD, membahas kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM-MD tahap sebelumnya, dan inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa dan dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa musyawarah desa membahas tentang diadakannya pemilihan kader pemberdayaan masyarakat desa merupakan warga desa terpilih yang bertugas untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan partisipatif dalam PNPM-MD di Desa Batuma'lonro, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Kemudian terdapat juga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berperan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Desa Batuma'lonro serta berperan dalam mengelola administrasi dan keuangan program ini.

Disimpulkan bahwa efektivitas yang merupakan bagian dari kriteria evaluasi kebijakan program menunjukkan belum sepenuhnya efektif masih memerlukan tindak lanjut untuk pengembangan usaha, terutama untuk kelompok usaha wanita dalam bentuk SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan). Bantuan usaha perbengkelan dan Bantuan Modal Kepemudaan Karang Taruna di Desa Batuma'lonro juga dinilai belum efektif.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur (jalan tani, irigasi persawahan, dan pembangunan plat duecker) serta 2 (dua) kelas PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sejauh ini berjalan cukup efektif karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut.

b. Efisiensi

Dapat diketahui bahwa pembangunan prasarana pendidikan ruang kelas PAUD 2 unit adalah 42 m², menggunakan total anggaran sebesar Rp 100.683.600 dengan rincian Rp 112.758.600 dengan tambahan Rp 1.207.500

dari swadaya masyarakat pembangunan fisik 95.649.500 dan administrasi dan operasional TPK 3% = 3.020.500. administrasi UPK 2% = 2.013.600 dan kemudian program SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) menggunakan anggaran sejumlah Rp 306.000.000 untuk bantuan dana pinjaman yang dibagi pada 15 kelompok perempuan yang ada di Desa Batuma'lonro.

Diperoleh gambaran bahwa efisiensi PNPM-MD di Desa Batuma'lonro cukup efisien untuk pembangunan kelas PAUD namun untuk SPKP masih membutuhkan bantuan dan dorongan pendanaan oleh pemerintah.

c. Kecukupan

Berdasarkan sejumlah wawancara diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat dari program PNPM-MD dianggap sudah mencukupi jika dilihat dari pembangunan kelas PAUD yang memberikan manfaat kepada masyarakat kategori miskin yang menjadi prioritas sementara untuk bantuan pendanaan bagi kelompok wanita melalui SPKP dinilai masih perlu ditingkatkan terutama tambahan pendanaan yang dianggap masih relatif kurang untuk mengembangkan usaha kelompok wanita Desa Batuma'lonro.

Perataan kebijakan program

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perataan dari masyarakat penerima manfaat dari kebijakan program ini dianggap sudah cukup memberikan pemerataan yang obyektif karena diprioritaskan untuk masyarakat kategori miskin dan yang memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya.

Dari sejumlah kriteria evaluasi program PNPM-MD di Desa Batuma'lonro diperoleh pemahaman bahwa efektivitas program yang menjadi bagian kriteria dari evaluasi kebijakan program PNPM-MD di Desa Batuma'lonro dengan adanya keberadaan kelas PAUD cukup efektif dalam memberikan solusi masalah pendidikan bagi masyarakat miskin. Begitu pula dengan adanya pembangunan infrastruktur (jalan tani, irigasi persawahan, dan pembangunan plat duecker) di Desa Batuma'lonro. Sementara untuk Kegiatan bantuan modal seperti, Bantuan Modal Kepemudaan Karang Taruna dan SPKP belum

dapat dikatakan efektif, karena masih memerlukan tindak lanjut untuk pengembangan usaha terutama untuk kelompok usaha wanita yang ada di Desa Batuma'lonro yang membutuhkan pengembangan berupa upaya pemasaran produk yang mereka hasilkan.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Batuma'lonro.

a. Faktor internal

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa faktor internal yang memengaruhi evaluasi PNPM-MD di Desa Batuma'lonro adalah adanya komitmen dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, fasilitator kecamatan, serta unit internal TPK untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM-MD. Selain itu peran koordinasi sekaligus administrasi dalam menyukseskan PNPM-MD di Desa Batuma'lonro sangatlah penting.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh pemahaman bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi evaluasi kebijakan PNPM-MD di Desa Batuma'lonro adalah partisipasi masyarakat dan pengawasan yang mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Batuma'lonro. Masyarakat terlihat cukup antusias dengan adanya dana swadaya dari masyarakat dan dorongan untuk meningkatkan pendanaan bagi kelompok usaha ekonomi yang menjadi bahan evaluasi bagi PNPM-MD ini.

Berangkat dari sudut pandang internal dan eksternal yang memengaruhi evaluasi kebijakan PNPM-MD di Desa Batuma'lonro ini maka dapat diperoleh pemahaman bahwa adanya komitmen unit-unit pengelola PNPM-MD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan faktor internal yang mendukung dalam pelaksanaan PNPM-MD ini. Disamping itu, partisipasi masyarakat menjadi hal yang dapat mempengaruhi evaluasi kebijakan hal ini ditandai dari adanya dorongan untuk meningkatkan pendanaan yang dinilai masyarakat masih kurang.

5. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan evaluasi kebijakan menemukan bahwa PNPM-MD di Desa Batuma'lonro cukup efektif dalam memberikan solusi masalah kemiskinan terutama perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa. Sementara bantuan modal usaha untuk pembengkakan, Bantuan Kepemudaan Karang Taruna, dan SPKP dinilai masih perlu ditingkatkan dalam hal pengembangan usaha dan kondisi tersebut dinilai tidak efisien karena pendanaan yang relatif kecil. Hal ini juga berimbas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok usaha perempuan yang menganggap program pendanaan tersebut belum mencukupi. Sementara untuk perataan program kebijakan telah dirasakan oleh masyarakat yang memiliki motivasi meningkatkan pendapatan mereka terutama kelompok usaha perempuan.

Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi evaluasi kebijakan PNPM-MD ditandai dengan adanya komitmen pemerintah kecamatan, pemerintah desa, fasilitator kecamatan, dan unit-unit seperti TPK dan UPK dalam mengelola PNPM-MD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan faktor internal yang mendukung. Selain itu faktor eksternal berupa partisipasi masyarakat dan pengawasan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat menjadi hal yang dapat memengaruhi evaluasi kebijakan, hal ini ditandai dari adanya dorongan untuk meningkatkan pendanaan yang dinilai masyarakat masih kurang dan perlu ditingkatkan.

6. REFERENSI

- Abidin, Said Zaenal. (2004) *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anjayani, Eni. (2007) *Mengenal Beberapa Program Pembangunan*. Klaten; Cempaka Putih
- Anderson, James E. (1974). *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston
- Azikin, Andi. (2005). *Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Rangka Pembangunan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Pamong Praja Abdi Negara 8, (1), 72-80
- Edward III, George C. (1990). *Analysis and Approach of Strategy*. Manchester: Manchester University Press
- Haryanto, Tri (2007). *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten; Cempaka Putih
- Jones, Carles O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press
- Mafruhah, Izza. (2009). *Multidimensi Kemiskinan*. Surakarta: UNS Press
- Nawawi Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi, Teori, dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant D. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elekx Media Komputindo
- Ndraha, Taliziduhu. (1981). *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP
- Solichin, Abdul (2001). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, A. G. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sumodiningrat, Gunawan. (2007). *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Buku Kompas
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2009). *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Kepmen Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Petunjuk Teknik Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 2011